

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lahan pertanian, dimana sektor pertanian menjadi salah satu faktor penopang dalam meningkatkan perekonomian negara, serta mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 total penduduk bekerja sebanyak 135,61 juta jiwa dimana penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi yang terbesar dibanding lapangan pekerjaan utama lainnya, yakni mencapai 29,96%¹.

Sektor pertanian di Indonesia sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang beranekaragam dan melimpah ditambah posisi dan letak negara Indonesia yang sangat strategis jika dilihat dari sisi geografis. Disamping itu, sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat. Serta sektor pertanian menjadi sumber bahan baku bagi proses industri disektor lainnya².

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pemerintah berusaha menyediakan sarana produksi pertanian dimana pengadaan pupuk menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan pertanian. Pupuk sebagai

¹ Badan Pusat Statistik (2022)

² Mi' Rojun Nurun Nadziroh. *Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magrtan*. Vol (2) No 1. Jurnal AGRISTAN. 2020. Hal 53

sarana produksi tanaman memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan hasil produksi, mengingat pupuk merupakan sumber zat hara yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, memperbaiki struktur dan kesuburan tanah serta mempercepat pertumbuhan tanaman. Sehingga pupuk berperan penting dalam produktivitas tanaman³. Selain itu pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional⁴.

Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani, agar saat petani membutuhkan pupuk, pupuk tersedia dengan harga yang dapat dijangkau. Kebijakan mengenai penyediaan pupuk bersubsidi ini sebenarnya sudah lama ditetapkan yang mana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Program pupuk bersubsidi yang diluncurkan pemerintah ditujukan bagi petani skala kecil agar dapat memenuhi asas enam tepat dalam budidaya tanaman yakni ketepatan jumlah, ketepatan jenis, ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan mutu dan ketepatan harga⁵. Tepat jumlah maksudnya pupuk yang digunakan harus sesuai dengan anjuran pemerintah, tepat jenis maksudnya jenis pupuk yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan petani, tepat waktu maksudnya pupuk harus ada ketika petani membutuhkan, tepat tempat maksudnya

³ Widarti, Kurniawan, & Simpuk, S. 2016. *Analisis Pemasaran Pupuk Bersubsidi Tanaman Pangan*. Jurnal Agrosains, 13(2), 9–13.

⁴ PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022

⁵ Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, 2022

petani dapat membeli pupuk di pengecer yang telah ditentukan, tepat mutu maksudnya sesuai dengan kualitas, tepat harga maksudnya pembelian harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan

Meskipun kebijakan mengenai pupuk bersubsidi sudah sering diperbarui namun kebijakan bersubsidi tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, hal tersebut dibuktikan dengan seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi dan subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat dalam penelitian Chakim, mengungkapkan permasalahan yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi meliputi kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena kebutuhan akan pupuk yang tinggi sedangkan ketersediaan di tingkat pengecer atau penjual serta distributor rendah. Seringkali ketika dibutuhkan persediaan tidak ada dan mengakibatkan harga pupuk yang semakin meningkat. Hal tersebut karena ketidakmerataan akan distribusi pupuk bersubsidi baik di tingkat distributor wilayah maupun di tingkat petani⁶.

Disisi lain Ashari & Hariani dalam penelitiannya mengungkapkan kendala dalam program pupuk bersubsidi yakni perencanaan penggunaan pupuk oleh kelompok tani yang sering melebih-lebihkan, lokasi kios penjual pupuk yang jauh dari lokasi petani, jenis pupuk yang dibutuhkan tidak selalu tersedia, dan volume pupuk yang akan dibeli tidak cukup efisien dalam hal transportasi, dampaknya

⁶ Chakim, M. L. *Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah*. Jurnal Pangan. 2020

adalah harga pupuk ditingkat pengecer tidak sepenuhnya mengacu pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan dan mengakibatkan pemupukan menjadi tidak maksimal⁷.

Melihat kondisi yang sering terjadi serta dalam rangka meningkatkan pertanian Indonesia Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia membuat sebuah program perlindungan bagi petani yaitu program kartu tani. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi yaitu pada pasal 15 ayat 2 ditegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan menggunakan kartu tani. Program ini dimulai tahun 2017 di Pulau Jawa sebagai *pilot project* dan pada tahun 2018 di perluas ke luar Pulau Jawa⁸ dan dilaksanakan hingga saat ini.

Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) di kios pengecer resmi⁹. Kartu tani ini dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani yang mana kartu ini terintegrasi dengan SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia). Program kartu tani ini bertujuan untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia tepat sasaran dan

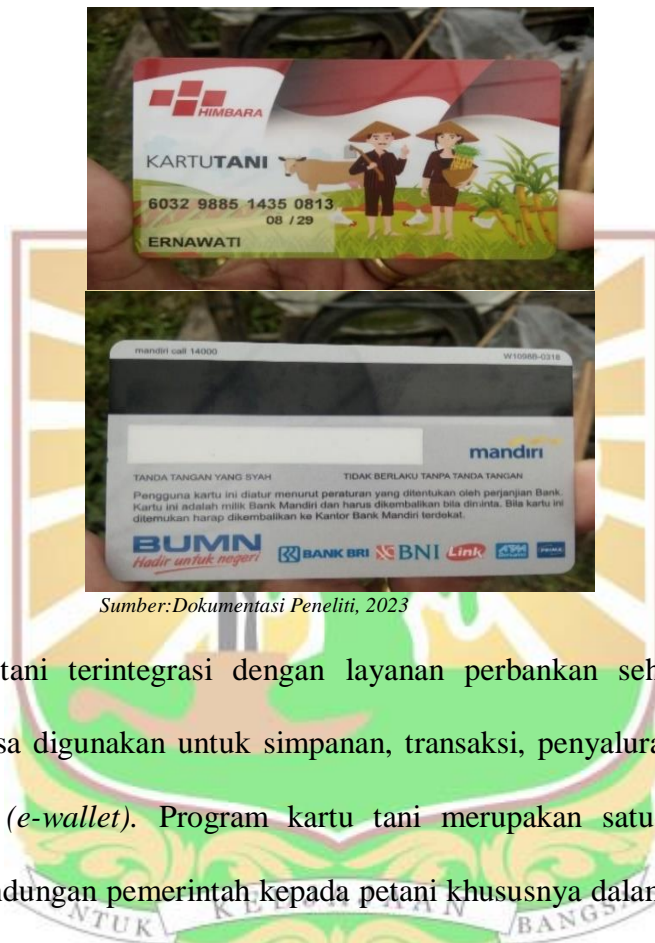
⁷ Mutiara Latifa Ashari & Dyah Hariani. *Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara*. 2019

⁸ Koko Widyat Moko, Suwanto dan Bekti Wahyu Utami. *Perbedaan Persepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani Di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen*. 2017. 32(1). *Journal of Sustainable Agriculture*.

⁹ *Op.cit* hal 4

merata sesuai dengan kebutuhan petani. Berikut merupakan bentuk dari kartu tani yang dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1. 1
Kartu Tani



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Kartu tani terintegrasi dengan layanan perbankan sehingga memiliki multifungsi bisa digunakan untuk simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman dan kartu subsidi (*e-wallet*). Program kartu tani merupakan satu-satunya bentuk program perlindungan pemerintah kepada petani khususnya dalam memenuhi hak petani dalam mendapatkan subsidi pupuk. Program ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani. Dimana dikatakan bahwa perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim yang dalam hal ini perlindungan yang di maksud yaitu mempermudah petani dalam

mendapatkan pupuk bersubsidi¹⁰. Disamping itu program ini memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya, kartu ini menghimpun data petani yang lengkap dan akurat melalui sistem E-RDCK serta validasi data dilakukan secara online, transparan dan multifungsi.

Tujuan diterapkannya program kartu tani yaitu untuk mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi, mengendalikan pupuk bersubsidi dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar transparan dan tepat sasaran kepada petani kecil yang berhak menerimanya serta sesuai dengan asas 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, dan tepat harga. Asas enam tepat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Kartu tani ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam mengintervensi program untuk petani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. Semua program bantuan pemerintah dibidang pertanian akan disalurkan melalui kartu ini, sehingga pemberian bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berguna untuk petani. Pasalnya kartu tani bertujuan sebagai identitas profesi perlindungan bagi petani di Indonesia, melalui program Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Namun hal tersebut tidak mudah bagi pemerintah untuk meyakinkan petani terhadap hal yang dianggap baru bagi mereka, maka dari itu pemerintah perlu

¹⁰ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

manajemen program kartu tani yang baik agar program kartu tani berjalan sesuai dengan tujuan. Dimana menurut William H Newman manajemen terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan pengawasan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang telah menjadikan kartu tani sebagai alat bantu untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah yaitu Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduk di Sumatera Barat bermata pencarian sebagai petani dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2022 distribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga yang berlaku tahun 2021 sektor pertanian bersama dengan sektor kehutanan dan perikanan menduduki urutan pertama yakni sebesar 21,71%¹¹.

Provinsi Sumatera Barat ditunjuk menjadi salah satu Provinsi percontohan (*Pilot Project*) pelaksanaan kartu tani melalui transaksi non tunai pembelian pupuk bersubsidi dari 10 provinsi diluar Pulau Jawa¹².



Tabel 1. 1
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Sumatera Barat Tahun 2022

Jenis Pupuk yang disubsidi	Kebutuhan Pupuk bersubsidi (Ton)
Urea	151.297
SP36	39.410
ZA	19.934
NPK Phonska	228.597
Organik	119.431
Jumlah	558.670

Sumber : Data Olahan Peneliti dari [https://sumatra.bisnis.com/read/20220118/534/1490646/Kebutuhan_Pupuk_Bersubsidi_di_Sumbar_2022_Meningkat,_Alokasi_Tersedia_Hanya_Sedikit_\(bisnis.com\)](https://sumatra.bisnis.com/read/20220118/534/1490646/Kebutuhan_Pupuk_Bersubsidi_di_Sumbar_2022_Meningkat,_Alokasi_Tersedia_Hanya_Sedikit_(bisnis.com))

¹¹ BPS Sumatera Barat, 2022

¹² Sumbarprov.go.id

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumatera Barat sebanyak 558.670 ton, sedangkan pupuk bersubsidi yang di alokasikan untuk Sumatera Barat pada tahun 2022 sebanyak 188.139 ton¹³. Dapat kita lihat dimana tidak semua kebutuhan pupuk bersubsidi yang di usulkan dapat terpenuhi oleh Kementan jadi penting adanya manajemen yang baik agar pupuk yang diberikan benar-benar dapat tepat sasaran sesuai dengan petani yang membutuhkan.

Tabel 1. 2
Alokasi Kartu Tani di Sumatera Barat tahun 2021-2022

No	Kab/Kota	Kartu Tani
1	Agam	34.886
2	Dharmasraya	20.688
3	Kepulauan Mentawai	2.963
4	Kota Pariaman	868
5	Kota Padang	10.389
6	Kota Padang Panjang	1.265
7	Kota Pariama	3.277
8	Kota Payakumbuh	6.237
9	Kota Sawah Lunto	3.822
10	Kota Solok	1.762
11	Lima Puluh Kota	34.202
12	Padang Pariaman	33.289
13	Pasaman	31.790
14	Pasaman Barat	35.873
15	Pesisir Selatan	38.263
16	Sijunjung	18.129
17	Solok	30.559
18	Solok Selatan	17.512
19	Tanah Datar	52.465

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Dinas Pertanian Kab. Agam

¹³ [https://sumatera.bisnis.com/read/20220118/534/1490646/Kebutuhan_Pupuk_Bersubsidi_di_Sumbar_2022_Meningkat,_Alokasi_Tersedia_Hanya_Sedikit_\(bisnis.com\)](https://sumatera.bisnis.com/read/20220118/534/1490646/Kebutuhan_Pupuk_Bersubsidi_di_Sumbar_2022_Meningkat,_Alokasi_Tersedia_Hanya_Sedikit_(bisnis.com)) (diakses pada 28 Maret jam 23.00 wib)

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat pelaksanaan kartu tani ini telah tersebar di 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang telah menggunakan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi adalah Kabupaten Agam. Program kartu tani di Kabupaten Agam ini telah diatur oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Indonesia, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521.4.62-2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota serta Keputusan Bupati Agam Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Kecamatan.

Sektor pertanian di Kabupaten Agam memberikan kontribusi PDRB yang paling besar dari pada sektor lainnya, sebanyak 31.07% dan menyerap tenaga kerja sebesar 38,44%¹⁴. Sektor pertanian menjadi titik berat pembangunan perekonomian di Kabupaten Agam, hal ini didukung oleh potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Agam yang besar dan beranekaragam serta kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian¹⁵. Adapun ruang lingkup dari sektor pertanian meliputi usaha-usaha disubsektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perkebunan¹⁶. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku, subsektor tanaman pangan dan hortikultura

¹⁴ BAPPEDA Kabupaten Agam tahun 2020

¹⁵ Renstra Dinas Pertanian Kab. Agam Tahun 2021-2026

¹⁶ Fastabiqul Khairad, 2020, Analisis Wilayah Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pada Subsektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura di Kabupaten Agama, *jurnal AGRIFO*, vol 5 (1)

memiliki nilai paling tinggi.¹⁷. Karena sektor ini memegang peranan penting dalam penyediaan kebutuhan pokok dan sumber mata pencarian mayoritas masyarakat. Tidak diragukan, profesi ini sangat potensial dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Agam. Sehingga pentingnya perlindungan bagi petani di Kabupaten Agam.

Pengembangan sektor pertanian didukung oleh ketersediaan potensi sumber daya lahan pertanian berupa lahan pertanian sawah sebagai potensi tanaman pangan utama. Berikut merupakan luasan persawahan yang ada di Sumatera Barat dimana wilayah Kabupaten Agam menduduki urutan pertama dengan luas lahan persawahan terluas.

Tabel 1. 3
Luas Lahan Persawahan di Sumatera Barat tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	112
2	Kabupaten Pesisir Selatan	21.332
3	Kabupaten Solok	22.202
4	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	6.136
5	Kabupaten Tanah Datar	18.033
6	Kabupaten Padang Pariaman	17.898
7	Kabupaten Agam	24.947
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	15.098
9	Kabupaten Pasaman	19.613
10	Kabupaten Solok Selatan	9.994
11	Kabupaten Dhamasraya	5.770
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.464
13	Kota Padang	6.167
14	Kota Solok	684,2
15	Kota Sawahluno	757,5
16	Kota Padang Panjang	630
17	Kota Bukittinggi	343,6
18	Kota Payakumbuh	2.593

¹⁷ Op.cit

19	Kota Pariaman	1.996
----	---------------	-------

Sumber : Data BPS Sumatera Barat, 2017

Dilihat dari tabel 1.3 terdapat 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan luas lahan sawah yang dimiliki masing-masing daerah dimana Kabupaten Agam menempati urutan pertama dengan luas lahan persawahan terluas yaitu 24.947 Ha. Dengan luas lahan persawahan yang dimiliki Kabupaten Agam tentunya jumlah sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan juga lebih banyak.

Adapun rincian luas lahan persawahan dan hasil produksi padi di Kabupaten Agam per kecamatan berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam dapat dilihat dalam tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Luas Lahan Persawahan dan Hasil produksi per Kecamatan di Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Produksi Padi (2022)
1	Baso	1.780.21	26.977
2	Palembayan	3.271.73	40.605
3	Sungai Pua	535.71	7.574
4	Matur	1.428.15	20.376
5	IV Koto	1.318.94	16.161
6	Banuhampu	952.53	13.923
7	Tilatang Kamang	2.230.97	33.625
8	Palupuh	1.075.31	12.185
9	Kamang Kagek	1.858.57	27.973
10	Malalak	801.79	11.650
11	Tanjung Mutiara	874.81	27.456
12	Lubuk Basung	3.849.76	53.001
13	Tanjung Raya	2.262.82	31.793
14	Ampek Nagari	1.159.92	16.419
15	Ampek Angkek	1.545.2	20.884
16	Candung	1.383.71	20.083
Jumlah		24.947.80	365.022 (Ton)

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam

Dilihat dari tabel 1.4 diatas dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam peneliti berfokus pada dua kecamatan yang dilihat atas luas lahan persawahan yang dimilikinya serta hasil produksi padi yakni Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Lubuk Basung. Karena pada Kecamatan Lubuk Basung menempati urutan pertama dengan luas lahan persawahan 3.849.76 ha dan Kecamatan Sungai Pua menempati urutan terakhir dengan luas lahan persawahan 535.71 ha.

Pelaksanaan program kartu tani tentunya harus di manajemen dengan baik. Perencanaan kartu tani ini dilaksanakan oleh Kementan dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian 45.11 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023. Dalam perencanaan kartu tani ini melibatkan beberapa instansi yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Wali Kota. Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dalam wawancara sebagai berikut:

“Program kartu tani ini merupakan program pusat melalui Kementerian Pertanian serta perencanaan program kartu tani ini di kerjasamakan oleh empat kementerian yaitu, Kementerian Pertanian, Perbankan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri”(wawancara dengan Bapak Imrefli selaku Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Agam pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 08.46 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ketahui bahwa program kartu tani merupakan program yang digagas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan menggandeng berbagai instansi lainnya, yang mana program ini pelaksanaannya akan diserahkan ke masing-masing wilayah yang ada di Indonesia.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dilakukan secara berjenjang yaitu melalui produsen, distributor, dan pengecer hingga sampai pada kelompok tani/petani. Pengecer menyalurkan pupuk berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Penebusan pupuk bersubsidi ini hanya dapat menggunakan kartu tani sesuai kepemilikan, namun apabila kartu tani belum tersedia di suatu wilayah maka penebusan dapat dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan KTP dimana petani tersebut tercatat di RDKK sebagai penerima kartu tani namun belum memperoleh kartu tani¹⁸

Di Kabupaten Agam perencanaan program kartu tani ini dimulai pada tahun 2019 dan pembagian kartu tani dimulai pada awal Januari 2020. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 34.886 petani mendapatkan kartu tani namun yang terdistribusi baru sebanyak 25.927 kartu tani¹⁹ sehingga dapat dikatakan bahwa belum semua petani memperoleh kartu tani di Kabupaten Agam. Hal ini dikarenakan saat pembagian kartu ada petani yang tidak datang, dalam proses pendataan ada petani yang tidak terdata, serta ada juga kendala dalam sinkronisasi data kartu tani yang terlambat keluar.

Dalam pembuatan kartu tani terdapat beberapa prosedur mulai dari penyusunan RDKK hingga penerbitan kartu tani dan penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer menggunakan kartu tani. Prosedur ini sesuai dengan yang

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11 tahun 2022

¹⁹ Laporan rekapitulasi dari target dan realisasi pendistribusian kartu tani Dinas Pertanian Kab. Agam

disampaikan oleh Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian kabupaten Agam dalam wawancara berikut.

“Prosedurnya yaitu petani tergabung dalam kelompok tani, menyiapkan berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan yakni fotocopy KTP, fotocopi surat tanah, fotocopi kartu keluarga, selanjutnya menyerahkan berkas tersebut kepada ketua kelompok, setelah berkas terkumpul semua berkas diserahkan ke petugas penyuluh lapangan untuk selanjutnya bersama penyuluh disusun RDKK yang akan di upload kedalam sistem, kemudian Dinas Pertanian melakukan proses verifikasi dan validasi data. Data yang akan di verifikasi diantaranya NIK, luas lahan hingga jenis pupuk yang dibutuhkan. Setelah data terverifikasi pihak Bank Mandiri akan mencetak dan menyerahkan kartu tani kepada petani bersama pihak dinas maupun BPP”(Wawancara dengan Bapak Impreli, SP selaku Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 10.30)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kartu tani ini ada prosedur pembuatan yang jelas yang mana jika prosedur ini tidak dilakukan dengan benar maka penyaluran pupuk bersubsidi tidak akan terlaksana.

Kesuksesan program kartu tani tentunya juga dipengaruhi oleh pengorganisasian. Pelaksanaan program kartu tani di kategorikan dalam beberapa level manajemen mulai dari pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5

Tugas Dan Tanggung Jawab Jajaran Pemerintahan dalam Program Kartu Tani

No	Jajaran Pemerintahan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pusat	Melakukan koordinasi untuk merumuskan kebijakan pengelolaan pupuk bersubsidi
		Menyusun petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi
		Menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi
		Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan
		Mengajukan pembayaran subsidi pupuk

2	Provinsi	Melaksanakan koordinasi
		Menyusun petunjuk pelaksanaan
		Menyusun konsep alokasi pupuk
		Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan
		Menganalisa laporan dari kabupaten
3	Kabupaten/Kota	Melaksanakan koordinasi
		Menyusun petunjuk teknis
		Menyusun konsep alokasi tingkat kecamatan
		Melakukan pembinaan pada petugas yang menangani pupuk bersubsidi
		Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan ke tingkat provinsi.

Sumber : Data olahan peneliti dari Keputusan Jendral Prsarana dan Sarana Pertanian 2022

Dari tabel 1.5 dapat kita lihat bahwa pelaksanaan program kartu tani ada rantai manajemen dari pusat ke daerah dan ada koordinasi yang jelas antar pelaksana. Dan masing-masing pelaksana melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program kartu tani ini merupakan program kementan yang kemudian di realisasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam sebagai pelaksana di tingkat kabupaten. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Agam bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai pihak ketiga melalui nota kesepakatan, dimana Bank Mandiri bertanggung jawab dalam menyediakan mesin EDC (*electronic data capture*) dan kartu tani. Dalam pengadaan pupuk Dinas pertanian Kabupaten Agam bekerjasama dengan beberapa distributor sebagai berikut :

Tabel 1. 6
Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Agam

No	Jenis Pupuk	Distributor	Wilayah Kerja
1	Urea	PT Fajar Semesta Harapan	Tanjung Mutiara Lubuk Basung Tanjung Raya Ampek Nagari
		CV. Putra Arena	Baso Palembayan

			Sungai Pua
		PT Tina Dimans Raya	Ampek Angkek Candung
		CV. Dt. Kabasaran	Matur, Banuhampu, Tilatang Kamang IV Koto, Palupuh, Kamang Magek, Malalak
2	SP36, Phonka, ZA dan Organik	PT Pertani (Shang Hyang Sri)	Ampek Nagari, Matur, Banuhampu, Tilatang Kamang IV Koto, Palupuh, Palembayan
		CV Tazar & Co	Candung, Baso, Banuhampu, Ampek Angkek, Kamang Magek
		CV Fajar Semesta	Lubuk Basung, Tanjung Raya, Malalak

Sumber : Data Olahan Peneliti dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2022

Dari tabel 1.6 tersebut dapat dilihat terdapat 7 distributor pupuk bersubsidi yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Agam dimana distributor ini wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan stok yang telah ditetapkan²⁰.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, pada pertengahan tahun 2022 terjadi sedikit perubahan dalam jenis pupuk bersubsidi yang disediakan jika sebelumnya terdapat lima jenis pupuk yang disubsidi yaitu Urea, SP36, Phonka NPK, ZA dan Organik dipangkas menjadi Urea dan NPK saja. Serta stok pupuk yang tersedia di kios pengecer dapat di salurkan hingga September. Dan komoditas yang disubsidi hanya 9 jenis saja yang mana sebelumnya lebih dari 60 jenis, pemilihan 9 komoditas ini didasarkan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis yang berdampak terhadap inflasi. Adapun yang jenis komoditas yang di subsidi antara lain, padi, jagung, kedelai,

²⁰ Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/Sr/.310/B/03/2020

bawang merah, bawang putih, cabai, tebu, kopi, dan kakao. Diharapkan ketersediaan pupuk ini dapat memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Agam. Berikut merupakan rincian alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Agam:

Tabel 1. 7
Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Agam Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP36	Z.A	NPK	Organik
1	Baso	428.05	20.0	20	325.2	0
2	Palembayan	954.5	165.0	6	437	0
3	Sungai Pua	84.0	132.0	61	395	32
4	Matur	246	25.1	24	195	20
5	IV Koto	162.5	15.9	5.5	155	0
6	Banu Hampu	235.75	44.0	34	239.2	0
7	T. Kamang	875.7	74.4	59.6	505	48
8	Palupuh	343.6	15.0	8	210	0
9	Kamang Magek	408.5	17.0	7	430	0
10	Malalak	345.0	0	0	187	0
11	TJ.Mutiara	384.0	58.3	10.8	580	0
12	Lubuk Basung	1875.45	213	11	1425	10
13	TJ.Raya	449.3	0	0	380	0
14	Ampek Nagari	777	100	60	761	15
15	Ampek Angkek	460.6	11.0	12.3	195.9	0
16	Candung	300	47.0	31	272.7	0
Jumlah		8329.95	937	349	6693	125

Sumber : Data olahan peneliti dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam

Berikut data realisasi pupuk bersubsidi periode 2022 yang dapat kita lihat pada tabel

1.8

Tabel 1. 8
Data Realisasi Pupuk Bersubsidi Periode 2022

No	Jenis pupuk	Alokasi	Realisasi	%	Sisa	HET/Kg
1	Urea	8329.95	8329.10	100	0.9	2.250
2	NPK	6693	6691.9	99,98	1.1	2.300 & 3.300 (kakao)
3	ZA	349	349.58	100	0	1.700

4	SP36	937	937.726	100	0	2.400
5	Organik	125	125	100	0	800 & 20.000 (cair)
Jumlah		16394.95	100%		2	-

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam

Dari tabel 1.8 dapat dilihat bahwa realisasi untuk semua jenis pupuk yang disubsidi itu hampir mencapai seratus persen sehingga rasio realisasi dan anggaran untuk pupuk bersubsidi di Kabupaten Agam termasuk kategori sangat baik. Dan untuk realisasinya tergantung dari jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang di anggarkan Provinsi Sumatera Barat untuk daerah Kabupaten Agam serta ketersediaan pupuk yang ada.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani adanya kerjasama dengan kios-kios penjual pupuk di Kabupaten Agam, yang mana kios pengecer inilah yang langsung berhubungan dengan petani dalam pembelian dan transaksi pupuk. Syaratnya kios-kios tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai pemasok pupuk bersubsidi yang ditelah ditunjuk oleh distributor. Meskipun sudah ada kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu penebusan pupuk bersubsidi menggunakan mesin EDC sering mengalami error dan bahkan tidak bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi dimasing-masing petani serta ketersediaan jaringan internet untuk menggunakan mesin EDC juga kurang memadai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang petani

“Pernah sekali ketika saya hendak menebus pupuk bersubsidi di kios, pihak kios mengatakan kalau untuk sementara belum bisa mengambil pupuk, mesinnya rusak katanya. Jadi saya pulang lagi dan kembali beberapa hari setelahnya ketika mendapat info bahwa pupuk sudah bisa diambil”(wawancara dengan Rosniar selaku petani yang ada di Kabupaten Agam)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dimana mesin yang disediakan sebagai alat dalam penebusan pupuk bersubsidi sering mengalami error, bahkan rusak sehingga mengganggu masyarakat dalam melakukan transaksi. Berikut data jumlah kios dan jumlah mesin EDC yang ada di Kabupaten Agam:

Tabel 1. 9
Data Jumlah Kios dan Jumlah Mesin EDC Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah kios	Mesin EDC	
				Ada	Belum
1	Banuhampu	7	3	2	1
2	TJ. Mutiara	3	4	3	1
3	IV Koto	7	2	2	0
4	TJ. Raya	9	4	5	1
5	Kamang Magek	3	5	2	3
6	Baso	6	7	6	1
7	Ampek Angkek	7	5	0	5
8	Canduang	3	3	1	2
9	Matur	6	5	2	3
10	Tilatang Kamang	3	7	1	6
11	Lubuk Basung	5	12	12	0
12	Palupuh	4	6	3	3
13	Sungai pua	5	6	5	1
14	Palembayan	6	8	8	0
15	Ampek Nagari	4	7	7	0
16	Malalak	4	3	0	3
Jumlah		82	89	59	30

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel 1.9 dapat disimpulkan bahwa dari 89 jumlah kios yang ada di Kecamatan Agam hanya 59 kios yang memiliki mesin EDC dan 30 kios lainnya belum memiliki mesin EDC bahkan ada kios yang mesin EDC nya rusak. Padahal mesin EDC sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi, meskipun kios sudah terdaftar sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi resmi tapi jika belum memiliki mesin EDC belum dapat beroperasi. Sedangkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dibutuhkan mesin EDC sebagai alat transaksi, dengan terbatasnya mesin EDC akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Kurangnya mesin EDC ini juga disampaikan oleh kepala Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Agam sebagai berikut.

“Kendala di mesin EDC yang belum tersedia di beberapa kios resmi, jadi proses jual beli belum bisa dilakukan di beberapa kios meskipun sudah terdaftar, jadi adanya keluhan masyarakat (petani) yang lokasi berjauhan dengan kios resmi yang memiliki mesin EDC, sehingga tersendatnya penyaluran pupuk” (wawancara dengan ibu Armelia SP selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Agam pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 09.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapatnya kendala dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang disebabkan karena kurangnya mesin EDC di kios-kios resmi pupuk bersubsidi di Kabupaten Agam. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat jalannya suatu program dalam hal ini terbatasnya mesin EDC di kios pengecer. Keterbatasan mesin EDC dan kurangnya jumlah kios

ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh salah seorang petani dalam wawancara sebagai berikut:

“Penempatan kios pengecer pupuk bersubsidi terlalu jauh dari tempat tinggal petani, sehingga petani kesulitan untuk mengambil pupuk tersebut dan juga harus menambah biaya pengangkutan” (Hasil wawancara dengan petani pengguna kartu tani, Lembak pada 15 oktober 2021 pukul 15:13 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan terdapatnya kendala dimana jauhnya lokasi penebusan pupuk bersubsidi sehingga membengkaknya biaya transportasi bagi petani, penempatan kios pengecer pupuk bersubsidi jauh dari rumah petani membuat petani membayar ongkos transportasi yang lumayan besar apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.

Selain masalah tersebut dalam pelaksanaan program kartu tani ini dari segi sumber daya yang dimiliki masih kurang cukup, baik itu sumber daya sarana dan prasana, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Tenaga kerja penyuluh pertanian lapangan selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya, bersama dengan bidang peternakan seharusnya jumlahnya 188 orang namun yang ada hanya 80 orang saja hal ini dikarenakan ada yang pindah tugas dan ada yang pensiun, sementara itu belum ada rekrutmen khusus untuk tenaga penyuluh.²¹ Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki tentunya mempengaruhi pelaksanaan suatu program.

Target dari program kartu tani ini adalah petani jadi penting dilakukannya sosialisasi mengenai program kartu tani kepada masyarakat petani sehingga adanya kesepahaman mengenai tujuan dari program kartu tani, apalagi kebijakan

²¹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Agam, 2020

pengambilan pupuk bersubsidi menggunakan kartu merupakan hal yang baru bagi pelaksana maupun kelompok sasaran jadi perlu pengenalan bagaimana persyaratan, tata cara, prosedur pelaksanaannya hingga pemanfaatan kartu tani, namun didapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian masih belum optimal, karena masih dijumpai kelompok sasaran yang belum paham akan manfaat program kartu tani, serta sosialisasi yang dilakukan hanya sampai pada tahap pembagian kartu tani saja serta kegiatan sosialisasi kartu tani banyak di tumpangkan pada program lain, sehingga sosialisasi kartu tani menjadi bahan sampingan dalam penyuluhan program lain.

Adapun pengawasan yang dilakukan dalam kartu tani ini bersifat berjenjang dimana terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dinas pertanian melakukan pengawasan secara langsung yaitu dengan turun kelapangan, dan pengawasan secara tidak langsung dengan cara mengecek data oleh tim verifikasi dan validasi, namunnya nyatanya pengawasan yang dilakukan lebih berfokus pada pengawasan tidak langsung. Hal ini senada disampaikan oleh Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dalam wawancara sebagai berikut:

“untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap kartu tani ini, diadakannya pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Dinas Pertanian melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dan adanya pengawasan bersama oleh tim pengawas ditingkat kabupaten/kota yaitu KP3. Dan pengawasan tidak langsung dengan cara pengecekan data oleh tim verifikasi dan validasi. Kalau pengawasan langsung ini dinas hanya turun jika ada masalah yang cukup serius karena kartu tani ini sifatnya subsidi jadi kami tidak mau terlalu menekan pihak distributor ataupun kios pengecer”(Wawancara dengan Bapak Imrefli, SP selaku Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 10.01 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pengawasan dalam program kartu tani ini terbagi menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung serta ada pengawasan gabungan berbagai pihak yang dibentuk yaitu KP3, KP3 berfungsi dalam mengawasi perstisida dan pupuk dimana KP3 ini merupakan wadah pengawasan antar instansi terkait peredaran pupuk dan pestisida.

Beberapa fenomena yang peneliti lihat mengenai program kartu tani di Kabupaten Agam yaitu masih belum semua petani menerima kartu tani, mesin EDC yang tidak tersedia di kios resmi pemasok pupuk bersubsidi, sosialisasi yang masih menyebabkan petani yang tidak *open minded* dalam penggunaan kartu tani serta jarak kios pengecer dengan tempat tinggal petani yang terlalu jauh sehingga menambah biaya dalam pengangkutan. Padahal tercapainya tujuan dari sebuah program tentunya harus ada dukungan dari sumber daya baik itu, sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana yang memadai serta adanya dukungan sumber daya lainnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti uraikan diatas, peneliti tertarik meneliti tentang “Manajemen program Kartu Tani oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Agam”. Dalam penelitian ini akan fokus membahas program kartu tani yang mana program ini menarik untuk diteliti dari segi manajemennya. Selain itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam pembangunan nasional. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada dalam pencapaiannya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori William H Newman

yang terdiri dari 5 fungsi-fungsi manajemen. Yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengumpulan sumber daya, Pengendalian kerja dan Pengawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang peneliti uraikan di latar belakang dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana Manajemen Program Kartu Tani oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Agam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis Manajemen Program Kartu Tani oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan diharapkan bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Agam dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan manajemen program. Bukan hanya itu penelitian ini

diharapkan dapat menambah pengetahuan baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam menyelenggarakan program kartu tani.

1.4.3 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik terutama tentang Manajemen. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini

